

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Aturan ERP Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Penerapan jalan berbayar elektronik mendesak karena aturan pelat nomor ganjil-genap tak efektif mengurangi tingkat kemacetan.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — DKI menargetkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jalan Berbayar Elektronik akan disahkan pada tahun ini. Tujuannya, agar *electronic road pricing* (ERP) bisa diterapkan sebelum tahun berganti.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo hakuyakin pembahasan raperda tersebut tidak akan terhambat meski mereka tengah berselisih soal ERP di pengadilan. "Enggak masalah. Semuanya tetap berjalan," ujar dia kepada *Tempo*, akhir pekan lalu.

Pekan lalu, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan yang diajukan PT Bali Towerindo Sentra. Bali Towerindo menggugat pembatalan lelang yang diterbitkan oleh Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik—instansi di bawah Dinas Perhubungan. Hakim menganulir dan memerintahkan Dinas mencabut surat pembatalan lelang yang dilansir pada 2 Agustus 2019 tersebut. Dinas menyatakan permohonan banding dan akan tetap melaksanakan lelang ulang ERP pada tahun ini.

Melalui rancangan peraturan daerah tersebut, Dinas akan mengatur aspek teknis, yuridis, dan keberlanjutan penerapan jalan berbayar elektronik di Ibu Kota. "Termasuk juga sanksi bagi pelanggar," kata Syafrin.

Dia mengatakan naskah akademik raperda itu telah berada di Biro Hukum. Dinas tinggal mengikuti jadwal pembahasannya dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta.

Syafrin mengatakan lelang ERP bakal rampung pada Juni mendatang. Adapun pembangunan infrastruktur sistem jalan berbayar elektronik itu ditargetkan selesai sebelum tutup tahun. Pada tahap awal, aturan tersebut akan diberlakukan di Jalan Sisingamangaraja, Jenderal Sudirman, dan M.H. Thamrin.

Ketua Badan Pembentukan Perda Pantas Nainggolan mengatakan Raperda tentang Jalan Berbayar Elektronik itu telah masuk agenda kerja mereka. Mereka masih menunggu naskah akademik dan draf raperda tersebut dari pemerintah provinsi. "Semakin cepat diserahkan, pembahasannya bisa segera dilakukan,"

kata politikus PDIP itu.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Iskandar Abubakar menilai penerapan ERP di Jakarta sudah sangat mendesak. Sebab, pembatasan jumlah kendaraan bermotor melalui aturan pelat nomor ganjil-genap sudah mulai tidak efektif untuk mengurangi tingkat kemacetan.

Menurut Iskandar, ERP akan lebih efektif mengurangi kemacetan karena pengendara yang melalui ruas Sisingamangaraja-Sudirman-Thamrin akan dikenai biaya. Walhasil, orang akan berpikir ulang sebelum menggunakan kendaraan pribadinya. "Orang akan lebih *aware* karena *cost* hariannya meningkat," kata dia.

● IMAM HAMDI